

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Permasalahan

Dewasa ini, hubungan internasional dalam era globalisasi menghadapi tantangan krisis multidimensional yang tidak menentu. Di situasi yang tidak menentu, baik negara-negara maupun aktor lainnya dalam hubungan internasional harus mempererat kerja sama sedemikian rupa demi menjaga stabilitas ekonomi dan juga perdamaian global. Selain itu, peran institusi internasional baik yang secara formal maupun informal memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerja sama. Kerja sama menjadi sangat penting sebagaimana dunia saling bergantung di berbagai bidang seperti pasar keuangan, perubahan iklim, terorisme, penyakit menular, keamanan dan perdamaian nuklir, stok ikan dan sumber daya ekosistem, ketahanan pangan dan ketersediaan makanan (Cooper & Thakur, p. 5). Peranan institusi internasional yang dapat diamati yaitu forum G20 (*G20 Finance Forum* kala itu sebagai respon internasional) dalam merespon krisis finansial di Asia pada tahun 1999 yang kemudian menjadi awal pembentukan atau lahirnya forum tersebut yang diinisiasi oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat Larry Summers dan Menteri Keuangan Kanada Paul Martin yang menjabat saat itu (Luckhurst, 2016, p.1).

Krisis finansial di Asia dengan cepat memberikan dampak global pada sebagian negara-negara kaya seperti Amerika dan Eropa dan kemudian di sebut

sebagai Krisis Keuangan Global (KKG) pada tahun 2008 dan menjadi sebuah katalis dalam reorganisasi tata kelola ekonomi global (2016, p. 2). KKG juga disertai kritik terhadap kurangnya inklusivitas G7/G8 yang telah membuka jalan bagi pertemuan tingkat pemimpin atau kepala negara G20 (Zayim, 2019). Pertemuan kepala negara G20 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tahun 2008 memainkan peran utama dalam mengkoordinasikan tanggapan kebijakan terhadap KKG untuk menghindari dari malapetaka di mana para pemimpin G20 dengan cepat mendeklarasikannya sebagai 'forum utama kerja sama ekonomi internasional' yang kemudian mencerminkan pergeseran hegemoni yang signifikan atas tata kelola global menuju negara-negara berkembang tetapi tidak menentang otoritas atau tujuan lembaga keuangan internasional yang sudah ada (Cammack, 2012).

G20 diyakini sebagai terobosan bagi pembangunan tata kelola ekonomi dan politik global yang baru pada forum multilateral dengan transparansi, interdependensi dan kerja sama global. G20 adalah forum multilateral global utama yang terdiri dari 19 negara anggota dan kawasan Uni Eropa yang merepresentasikan negara-negara maju dan berkembang utama dunia di mana anggota G20 mewakili 85 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) global, 75 persen perdagangan internasional dan 60 persen atau dua pertiga populasi dunia (*World Population Review, 2022*). G20 merupakan sebuah platform multilateral yang sangat strategis dengan menjembatani negara-negara maju dan negara berkembang utama dunia serta memiliki peran signifikan dalam mengamankan pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi global di masa depan (*World Population Review, 2022*). Sehingga, G20 lebih tepat dikatakan sebagai forum diskusi dan koordinasi

kebijakan ekonomi secara informal bagi para *policy maker* dan berbagai pemangku kepentingan dalam mencari solusi terhadap krisis keuangan dan pemulihan ekonomi global.

Sebagai anggota G20 dan negara dengan pasar berkembang (*emerging market*), Indonesia mendapat kesempatan untuk memegang jabatan presidensi G20 tahun 2022. Penetapan Presidensi G20 Indonesia mengalami percepatan yang seharusnya dijadwalkan pada tahun 2023. Rotasi keketuaan atau jabatan presidensi G20 dilakukan secara bergantian setiap tahun dengan mekanisme negara yang memegang kursi presidensi bekerja sama dengan presidensi G20 sebelumnya dan penerusnya atau yang dikenal sebagai Troika guna memastikan kelangsungan agenda presidensi G20 tersebut. Pada saat Presidensi G20 Indonesia, negara-negara Troika G20 terdiri atas Italia dan India (G20 Indonesia, 2022). Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengumumkan pada konferensi pers secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor bahwa Indonesia mendapatkan kesempatan untuk memimpin G20 pada tahun 2022, bertukar masa jabatan kepresidenannya dengan India. Sesuai rencana awal, Indonesia diharapkan menjadi ketua G20 pada tahun 2023, namun akan tumpang tindih dengan jabatan Keketuaan Indonesia dengan ASEAN (Assegaf, 2020).

Berdasarkan keterangan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, penetapan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 berlangsung pada KTT G20 ke-15 di Riyadh, Arab Saudi, namun, proses serah terima Presidensi G20 dari Italia kepada Indonesia pada saat KTT G20 di Roma, Italia pada 30 - 31 Oktober 2021 (Kominfo, 2021). Setelah dilakukan serah terima pada KTT G20 di Roma,

Indonesia secara resmi memegang Presidensi G20 tahun 2022 selama periode satu tahun terhitung mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 (*Ministry of Foreign Affairs, 2022*).

Presidensi G20 Indonesia mengusung semangat pulih bersama dengan tema “*Recover Together, Recover Stronger*” sebagai upaya bersama dan bentuk inklusivitas dengan mencari jalan keluar atau solusi pemulihan dunia. Untuk itu, Indonesia fokus pada tiga sektor prioritas yang dinilai menjadi kunci yakni penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi digital dan transisi energi. Pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia ini berlandaskan pada prinsip inklusivitas sehingga Presiden Joko Widodo turut mengundang negara-negara tamu dan organisasi internasional untuk berpartisipasi di mana prinsip inklusivitas ini adalah prioritas kepemimpinan Indonesia pada forum G20 untuk mewujudkan semboyan “*leave no one behind*” (*Ministry of Foreign Affairs, 2022*).

Beberapa alasan dan motivasi Indonesia mengusulkan tema semangat pulih bersama dan tiga fokus prioritas pada masa jabatan presidensi G20, karena pada saat menjabat Indonesia dihadapkan pada tekanan global yang sangat signifikan. Pertama, yakni kondisi dunia yang masih berada dalam tekanan akibat pandemi Covid-19, termasuk bagi Indonesia. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan tidak hanya krisis kesehatan masyarakat tapi juga menyebabkan kerusakan parah pada perekonomian Indonesia dan global. Kehadiran pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan efek domino terhadap perekonomian Indonesia dengan kebijakan pada pembatasan kegiatan ekonomi secara global dan domestik untuk mencegah penyebaran penyakit dan telah menyebabkan permintaan dan penawaran (*supply*

and demand) menjadi terganggu yang berpotensi menyebar hingga krisis keuangan (Basri & Fitriana, 2022). Pada sektor ekonomi, meningkatnya angka pekerja yang dirumahkan dan lebih dari 1,5 juta pekerja yang terkena PHK, penurunan angka *Purchasing Managers Index (PMI) Manufacturing Indonesia* mencapai 45,3% pada Maret 2020, penurunan impor sebesar 3,7%, peningkatan inflasi sebesar 2,96% yang kemudian menyebabkan perekonomian Indonesia turun sebesar 5% pada 2020 serta penurunan okupansi pada sektor pariwisata pada tahun yang sama (Yamali & Putri, 2020).

Tidak hanya pandemi Covid-19, presidensi G20 Indonesia akan menjadi sangat krusial mengingat situasi global yang semakin tidak menentu dengan berbagai isu seperti perubahan iklim, ekonomi dan politik. Belum selesai dengan tekanan dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19, selama masa jabatan Presidensi G20 Indonesia dan disaat bersamaan krisis lain pun terjadi seperti konflik Rusia-Ukraina yang berdampak pada harga bahan dan pangan (Assegaf, 2022). Konflik Rusia dan Ukraina membayangi pemulihan ekonomi pasca pandemi dalam agenda Presidensi G20 Indonesia. Partisipasi Rusia dalam pertemuan-pertemuan G20 telah menjadi sumber ketegangan di dalam kelompok negara-negara ekonomi dan industri berkembang terkemuka yakni G7 dan negara ekonomi berkembang besar lainnya. Namun sebagai tuan rumah presidensi G20 dan di tengah ketegangan politik yang semakin melebar akibat perang Rusia - Ukraina, Indonesia tetap mempertahankan kebijakan luar negeri yang bebas-aktif dan tidak berpihak pada negara kekuatan besar (Ching, 2022).

Dalam menghadapi tekanan negara-negara barat untuk membatalkan kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin pada puncak KTT G20 di Bali, Indonesia justru turut mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan bahkan Presiden Joko Widodo akan melakukan perjalanan ke Rusia dan Ukraina pada 30 Juni dalam rangka persiapan KTT G20. Hal ini sebagai bentuk pendekatan kebijakan luar negeri Indonesia yang pragmatis dengan menjaga jarak yang sama (*pragmatic equidistance*) dari tekanan kekuatan besar Amerika dan China. Indonesia mengambil sikap untuk mendengarkan kekhawatiran negara-negara barat sambil menghindari untuk mendukung Rusia secara langsung (Dharmaputra, 2022).

Selain itu, tantangan yang dihadapi Indonesia selama masa jabatan presidensi G20 yaitu permasalahan peningkatan perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang berdampak secara global. Dr Nikos Christidis, *climate attribution scientist* menambahkan bahwa perubahan iklim telah mempengaruhi kemungkinan suhu ekstrem di Inggris dan melebihi 40 derajat celcius di seluruh belahan Inggris (UN News, 2022). Peristiwa cuaca panas ekstrem memang terjadi dalam variasi iklim alami karena perubahan pola cuaca secara global. Namun, *World Meteorological Organization* (WMO) menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi, durasi, dan intensitas peristiwa ini selama beberapa dekade terakhir jelas terkait dengan pemanasan global yang diamati dan dapat dikaitkan dengan aktivitas manusia. Pada masa jabatan Presidensi G20, Indonesia menunjukkan kepemimpinan dan komitmen yang tinggi terhadap berbagai isu strategis, khususnya pengelolaan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim.

Sebagai pemegang presidensi G20 dalam forum multilateral global, Indonesia sukses menjalankan serangkaian komponen acara dan forum diskusi dengan melibatkan aktor dari setiap kelompok kerja atau *working groups* yang terdapat di dalam dua pilar pembahasan yakni *Finance Track* atau pilar keuangan dan *Sherpa Track* atau pilar *sherpa* yang masing-masing membahas mengenai isu keuangan dan isu-isu ekonomi non keuangan yang bersifat lebih luas seperti isu-isu pembangunan, kesehatan dan transformasi digital. Bersamaan dengan pelaksanaan presidensi G20, Indonesia tidak dapat bekerja sendiri melainkan harus memperkuat jalur diplomasi dengan berbagai aktor yang terkait dengan tiga sektor prioritas Indonesia dalam forum G20 untuk mencapai kepentingan ekonomi nasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga kepentingan kolektif global.

Selama proses pelaksanaan G20 dan sebagai pemegang presidensi, Indonesia setidaknya melakukan kerja sama dan serangkaian diplomasi dengan berbagai lapisan organisasi internasional, para negara undangan (*invitees*), dan *engagement groups* dari negara-negara anggota dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang pada akhirnya menghasilkan *output* berupa *G20 Leaders' Declaration* di Bali. Tentu dalam kesempatan yang sangat langka ini menjadi momentum Indonesia untuk berperan aktif dalam forum multilateral global seperti forum G20 guna mencapai kebutuhan domestiknya serta melaksanakan mandat G20 sebagai forum koordinasi kebijakan ekonomi global.

Terlepas dari pembentukan awal forum G20 sebagai *crisis committee* dalam merespon krisis finansial di masa lampau, di era globalisasi yang semakin meningkatkan ketergantungan tentu saja banyak problematika dan isu global lain

yang timbul pada permukaan tata kelola global. Negara-negara anggota G20, termasuk Indonesia harus lebih peka terhadap situasi tantangan ekonomi, politik dan sosial yang lebih luas. Oleh sebab itu, Presidensi G20 Indonesia menjadi sangat penting untuk diteliti karena sedang berada pada fase transisi atau tahun ketiga pandemi covid-19 untuk memfasilitasi kerja sama multilateral dalam forum G20 melalui perumusan kebijakan ekonomi global bersama. Forum G20 sebagai institusi informal hanya memfasilitasi kerja sama multilateral dengan melibatkan berbagai para pemangku kepentingan dan aktor, dan bukan merupakan sebuah forum yang berlebihan maupun sebatas dianggap memperkuat negara-negara kekuatan dominasi G7 dan kekuatan superior seperti IMF (Kirton, 2013).

Penulis berargumen bahwa forum G20 telah berkembang dan memiliki citra positif di dalam tata kelola global, termasuk perkembangan keterlibatan aktor dan pemangku kepentingan juga berbagai isu-isu global strategis. Apalagi, Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 untuk pertama kali dan sebagai negara ekonomi berkembang di kawasan Asia mencerminkan forum G20 yang tidak saja di dominasi oleh kekuatan negara-negara G7. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai forum G20 itu sendiri sejak awal pembentukannya dan juga kontribusi Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 di tengah situasi tantangan global yang semakin tidak dapat ditentukan serta membuktikan natur forum G20 sebagai institusi informal dalam melaksanakan koordinasi kebijakan dan kerja sama demi kepentingan kolektif bersama.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang situasi global yang penuh tantangan dalam bidang politik, ekonomi dan kesehatan, Indonesia memerlukan kerja sama dengan semua pihak untuk menyukseskan Presidensi G20. Oleh sebab itu, tesis ini akan diawali dengan melihat forum G20 sebagai forum multilateral dan koordinasi kebijakan ekonomi global, dan kemudian lebih spesifik melihat kontribusi Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 tahun 2022. Adapun, tesis ini hendak mengidentifikasi dan menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana transformasi G20 semakin menunjukkan hubungan *complex interdependence* antar-anggota?
2. Bagaimana Indonesia memanfaatkan *complex interdependence* sebagai instrumen dalam menyukseskan Presidensi G20 Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman mengenai sejauh mana konsep *complex interdependence* dalam Presidensi G20 Indonesia digunakan untuk menavigasi pelaksanaan agenda G20 dan untuk menganalisis upaya Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 dengan mengaplikasikan karakteristik *complex interdependence* tersebut untuk menyukseskan agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran *complex interdependence* dalam Presidensi G20 Indonesia yang tercermin dari keberagaman aktor yang terlibat dan keberagaman isu-isu yang dibahas selama rangkaian Presidensi G20 Indonesia yang puncaknya yaitu bersama-sama mendeklarasikan *G20 Bali Declaration* sebagai bentuk

komitmen Indonesia dan negara-negara anggota G20 demi mencapai pemulihan ekonomi global.

1.4. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi kalangan akademisi tentang evolusi G20 secara umum dan aplikasi dari *complex interdependence* dan kerja sama multilateral selama pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan dan studi bagi peneliti dan para pengamat G20 serta bagi pusat studi G20 UPH dalam mempelajari atau memahami bagaimana kesuksesan Presidensi G20 Indonesia dalam kaitannya dengan konsep *complex interdependence* dan konsep kerja sama multilateral yang diimplementasikan oleh Indonesia selama presidensinya.

1.5. Penutup

Forum G20 merupakan forum primer multilateral ekonomi global dan terobosan baru dalam penanganan krisis ekonomi global dan juga upaya pencegahan krisis di masa depan, di mana sebagai contoh tahun 2020 menjadi saat yang tepat bagi forum G20 berperan lebih signifikan dalam penanganan krisis

ekonomi global. Tidak hanya fokus pada krisis ekonomi global, negara-negara anggota G20 juga mendiskusikan berbagai isu strategis yang berdampak langsung terhadap ekonomi global. Dengan keberhasilan Presidensi Saudi Arabia (2020) dan Italia (2021), Indonesia mendapatkan kehormatan untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dalam forum G20. Setelah memahami latar belakang dan rumusan masalah pada Bab I, selanjutnya dalam Bab II akan dijelaskan secara komprehensif mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari literatur studi terdahulu terkait topik penelitian, konsep dan teori dalam hubungan internasional yang relevan, dan model analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan membantu proses analisis mendalam pada Bab IV.

